

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# Pimpinan DPRD Optimistis Program Prioritas 2023

## Gambir, Warta Kota

Pimpinan DPRD DKI Jakarta optimistis terhadap program prioritas kegiatan pemerintah daerah dalam RAPBD tahun 2023 sebesar Rp 83,7 triliun.

Pemerintah DKI telah menetapkan program prioritas pada 2023, yaitu pengendalian banjir, penanganan kemacetan danantisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengaku optimis ketiga program prioritas akan berjalan maksimal. Hal ini mengingat adanya bentuk dukungan dari pemerintah pusat, seperti pemberian pinjaman melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk merealisasikan program pencegahan banjir.

"Saya optimis karena kali ini Pj Gubernur juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, bukan hanya izin untuk normalisasi kali dan sungai, tapi

juga uang dari pusat turun untuk tangani banjir, para ahli dan menteri juga turun langsung," kata Khoirudin.

"Jadi saya yakin program berjalan optimal," sambung pria yang juga menjadi Ketua DPW PKS DKI Jakarta ini.

Sementara anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Merry Hotma menjelaskan, APBD sebesar Rp 83,7 triliun berasal dari pendapatan daerah yang ditargetkan Rp 74,3 triliun serta penerimaan pembiayaan sebesar Rp 9,4 triliun.

Adapun pendapatan daerah Rp 74,3 triliun berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 52,77 triliun, pendapatan transfer Rp 18,45 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 3,14 triliun.

Sedangkan penerimaan pembiayaan Rp 9,4 triliun berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp 7,97 triliun, dan

penerusan pinjaman pembangunan MR Jakarta Rp 1,42 triliun.

Sedangkan rencana belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 74,6 triliun yang berasal dari belanja operasi Rp 60,18 triliun, belanja modal Rp 10,94 triliun, belanja ta terduga (BTT) Rp 2,85 triliun, dan belanja transfer Rp 356 miliar.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 9,4 triliun yang dialokasikan untuk delapan BUMD dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 7,2 triliun.

Kemudian pembayaran cicilan pokok hutang jatuh tempo Rp 1,78 triliun yang terdiri dari pembayaran utang membangun proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) atau pengerukan 13 sungai di Jakarta Rp 33,6 miliar dan pembayaran pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp 1,74 triliun. (faf)